



Firly Annisa, dkk.



DIGITAL CITIZENSHIP DALAM SITUASI PANDEMI

Partisipasi Daring, Solidaritas dan Ekuitas

Editor: Yeni Rosilawati

DIGITAL CITIZENSHIP
DALAM SITUASI PANDEMI

Partisipasi Daring, Solidaritas dan Ekuitas

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

DIGITAL CITIZENSHIP **DALAM SITUASI PANDEMI**

Partisipasi Daring, Solidaritas dan Ekuitas

Firly Annisa | Reza Widhar Pahlevi | Juhari Sasmito Aji | Kemala Hayati
Oktiva Anggraini | Dian Retnaningdiah | Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim
Muhammad Iqbal Khatami | Yeni Rosilawati | Nurul Ilham Maulana
Damian de Veuster Arlo Mahardyan | Febrio Wirayudha | Nur Sofyan
Zein Mufarrih Muktaf | Ane Permatasari | Rendi Eko Budi Setiawan
Fajar Junaedi | Inoke Raseru | Dea Anindya Ayuning Sukma



DIGITAL CITIZENSHIP DALAM SITUASI PANDEMI
Partisipasi Daring, Solidaritas dan Ekuitas

© Firly Annisa, dkk.

x + 260 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-606-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2023

Penulis : Firly Annisa, dkk.

Editor : Yeni Rosilawati

Sampul : Bagus

Layout : Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

Dalam era digital yang semakin maju, penting bagi kita sebagai warga negara digital untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang terkait *digital citizenship*. Namun, situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia memberikan tantangan baru dalam melaksanakan *digital citizenship*. Kita dihadapkan pada realitas bahwa kehidupan kita terus berlanjut di dunia maya, serta ketergantungan pada teknologi dan internet semakin meningkat. Buku yang mengangkat judul *Digital Citizenship dalam Situasi Pandemi: Partisipasi Daring, Solidaritas dan Ekuitas* ini mencoba melihat konsep *digital citizenship* dari tiga dimensi keterlibatan *online* dalam masyarakat: peluang ekonomi, partisipasi politik, dan partisipasi dalam teknologi komunikasi saat ini.

Kewarganegaraan yang demokratis diperlukan untuk melihat posisi warga negara yang tidak sebatas geografi dan kewajiban pribadi, namun juga harus dilihat sebagai praktik yang partisipatif dan kontributif terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam implementasinya, diperlukan keterampilan, taktik, dan posisi yang memungkinkan representasi dan interpretasi gagasan menggunakan berbagai bentuk yang difasilitasi oleh instrumen digital.

Digital citizenship dapat membantu mendorong penggunaan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Dalam situasi pandemi, teknologi digital menjadi sarana penting untuk mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan menjaga produktivitas di

tempat kerja atau belajar. *Digital citizenship* membantu memastikan bahwa orang menggunakan teknologi untuk kepentingan yang positif dan mampu menjawab tantangan aktual yang dihadapi saat pandemi Covid-19.

Konsep kewarganegaraan dalam konteks digital harus dipandang dari sudut pandang sosiokultural multidimensi berdasar pada perkembangan moral dan identitas kewarganegaraan yang sangat dinamis dalam interaksi di ruang digital. Selain itu, bentuk adaptasi partisipasi secara penuh dalam ruang digital diperlukan terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, dengan ditunjang pula dengan adanya solidaritas sosial dan kemahiran dalam membaca peluang ekonomi.

Namun pada kenyataannya, ada kesenjangan dalam akses teknologi antara minoritas dan orang miskin, dan kesenjangan digital ini tidak akan segera hilang. Dalam hal kebijakan publik, penting untuk menyoroti pentingnya mengatasi kesenjangan tersebut guna mencapai partisipasi penuh dan kewarganegaraan di abad ke dua puluh satu. Di mata media, kewarganegaraan digital sangat penting sebagai bagian dari keterlibatan politik dan sosial untuk mengatasi keterasingan sosial, yang tampaknya menjadi salah satu prosedur pandemi, dan media memanfaatkannya untuk menggalang solidaritas.

Buku ini membahas tentang bagaimana pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi secara *online*. Sebagai warga digital, kita harus memahami tanggung jawab dan hak-hak kita dalam menggunakan teknologi untuk menjaga partisipasi daring, solidaritas, dan ekuitas di tengah situasi yang sulit ini.

Melalui buku ini, pembaca akan dibawa melalui pengenalan konsep-konsep sekaligus penggalian tentang tema besar *digital citizenship* di masa pandemi yang diulas dalam sepuluh tulisan artikel dengan beragam sub tema dan bahasan. *Pertama*, ada Firly Annisa yang menulis mengenai bagaimana imajinasi sipil diekspresikan melalui ruang digital oleh warga negara digital yang tidak hanya

lantang untuk memprotes ketidakadilan, melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, namun juga melalui budaya populer yang terlihat remeh temeh menuangkan ekspresi aktivisme.

Kedua, ada tulisan dari Juhari Sasmito Aji, Reza Widhar Pahlevi, dan Kemala Hayati yang menganalisis secara sistematis riset *digital citizenship* dalam dimensi peluang ekonomi serta agenda masa depan, dengan mengkaji *digital citizenship* dan peluang ekonomi berdasarkan artikel-artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. *Ketiga*, Juhari Sasmito Aji, Oktiva Anggraini, Dian Retnaningdiah, dan Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim menulis tentang bagaimana *E-Government* berperan sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital dan mencegah korupsi di bidang pendidikan dengan melihat adanya peluang transformasi digital di saat pandemi Covid-19. *Keempat*, ada tulisan dari Muhammad Iqbal Khatami dan Yeni Rosilawati yang mengkaji tentang dinamika gerakan mobilisasi opini publik di ruang digital dan implikasinya terhadap aksi massa di Indonesia, dengan mengambil studi kasus aksi massa penolakan wacana penundaan pemilu di Indonesia pada 11 April 2022. *Kelima*, Yeni Rosilawati dan Muhammad Iqbal Khatami juga menulis tentang analisis Non-Fungible Token (NFT) sebagai peluang masa depan kekayaan intelektual, dengan studi kasus perbandingan dinamika ekonomi politik kebijakan NFT di Amerika Serikat dan Indonesia. *Keenam*, Nurul Ilham Maulana, Damian de Veuster Arlo Mahardyan, Febrio Wirayudha dan Nur Sofyan menulis tentang partisipasi politik Generasi Z dalam koridor masyarakat digital di Indonesia. Tulisan ini akan banyak mengulas tentang partisipasi politik modern generasi Z, seperti mengelola isu, membentuk tagar hingga merangkai narasi-narasi politik. *Ketujuh*, ada tulisan dari Zein Mufarrih Muktaf yang mengulas tentang deliberasi dan partisipasi informasi kebencanaan Gunung Merapi, terutama membahas tentang bagaimana dinamika relokasi di kawasan Area Terdampak Langsung (ATL) antara warga dengan pemerintah. *Kedelapan*, Ane Permatasari dan Rendi Eko Budi Setiawan mengulas tentang gender dalam *digital citizenship* dengan

melihat lebih dalam mengenai identitas perempuan sebagai ideologi perlawanan dalam kasus eksploitasi alam di Indonesia, dengan mengambil studi kasus Wadon Wadas. Kesembilan, Fajar Junaedi menulis topik tentang sepak bola dalam persimpangan politik di Indonesia, dengan menganalisis pemberitaan tentang glorifikasi Erick Thohir dalam Kongres Luar Biasa PSSI 2023 di pemberitaan media Asumsi.co dan Republika.co.id. Terakhir, ada tulisan dari Inoke Raserudan Dea Anindya Ayuning Sukma yang menulis tentang peranan media sosial sebagai wadah sosialisasi program Pemerintah Negara Fiji. Fiji merupakan kawasan di Pasifik Selatan yang juga terpapar oleh pandemi Covid-19. Namun, sama seperti negara lainnya, kini Fiji tengah berjuang untuk memulihkan kondisi negaranya, baik secara ekonomi, peningkatan wisatawan, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Kesepuluh tulisan dalam buku ini berusaha menekankan bahwa gagasan jejaring sosial dapat digunakan sebagai saluran untuk mobilisasi politik, sosial dan peningkatan partisipasi dalam banyak hal. Tulisan-tulisan tersebut juga berupaya menganalisis hubungan antara fungsi keterlibatan media sosial dalam penciptaan partisipasi publik di lingkungan digital. Selain itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kewarganegaraan digital dapat digunakan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam evolusi sistem sosial melalui jejaring sosial dan lingkungan virtual, mengubah cara individu, khususnya kaum muda, mengekspresikan solidaritas mereka.

Dalam situasi pandemi yang sulit ini, digital citizenship menjadi semakin penting bagi kita semua. Buku ini akan memberikan pandangan dan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kita dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab, solidaritas, dan adil dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia maya.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix

PARTISIPASI ATAU MENGAWASI? MEMAKNAI FENOMENA *CANCEL CULTURE* DALAM KERANGKA *DIGITAL CITIZENSHIP*

» Firly Annisa	1
----------------------	---

ANALISIS SISTEMATIS RISET *DIGITAL CITIZENSHIP* DALAM DIMENSI PELUANG EKONOMI SERTA AGENDA MASA DEPAN

» Reza Widhar Pahlevi, Juhari Sasmito Aji, Kemala Hayati.....	27
--	----

***E-GOVERNMENT* SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN DIGITAL DAN MENCEGAH KORUPSI DI BIDANG PENDIDIKAN**

» Juhari Sasmito Aji, Oktiva Anggraini, Dian Retnaningdiah, Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim.....	55
--	----

DINAMIKA GERAKAN MOBILISASI OPINI PUBLIK DI RUANG DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKSI MASSA DI INDONESIA

» Muhammad Iqbal Khatami, Yeni Rosilawati	79
---	----

NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) MASA DEPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL? DINAMIKA EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN NFT DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

- » Yeni Rosilawati, Muhammad Iqbal Khatami 105

PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM KORIDOR MASYARAKAT DIGITAL DI INDONESIA

- » Nurul Ilham Maulana, Damian de Veuster Arlo Mahardyan, Febrio Wirayudha, Nur Sofyan 127

DELIBERASI DAN PARTISIPASI INFORMASI KEBENCANAAN

- » Zein Mufarrih Muktaf 153

GENDER DALAM *DIGITAL CITIZENSHIP*: IDENTITAS PEREMPUAN SEBAGAI IDEOLOGI PERLAWANAN EKSPLOITASI ALAM DI INDONESIA (STUDI KASUS WADON WADAS)

- » Ane Permatasari, Rendi Eko Budi Setiawan 189

SEPAK BOLA DALAM PERSIMPANGAN POLITIK DI INDONESIA, GLORIFIKASI ERICK THOHIR DALAM KONGRES LUAR BIASA PSSI 2023 DALAM PEMBERITAAN MEDIA ASUMSI.CO DAN REPUBLIKA.CO.ID

- » Fajar Junaedi 209

MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH SOSIALISASI PROGRAM PEMERINTAH FIJI PASCACOID-19

- » Inoke Raseru, Dea Anindya Ayuning Sukma 231

TENTANG PENULIS 249

DELIBERASI DAN PARTISIPASI INFORMASI KEBENCANAAN

Zein Mufarrih Muktaf

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

Email: zein@umy.ac.id

Abstrak: Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia. Pada erupsi 2010, pemerintah mengambil kebijakan relokasi bagi warga yang tinggal di KRB III, khususnya di kawasan Area Terdampak Langsung (ATL). KRB III ATL adalah kawasan yang terkena langsung awan panas. Relokasi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Sebagian warga kembali ke KRB III ATL, dan tinggal permanen di kawasan tersebut. Pemerintah tidak memaksa untuk relokasi, dari awal hanya merekomendasi saja. Risikonya pemerintah tidak akan menanggung ganti rugi jika kemudian hari terjadi bencana kembali seperti sebelumnya. Tentu saja warga yang tinggal di kawasan tersebut memahami risiko yang dihadapi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui cara warga di KRB III ATL meningkatkan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana Gunung Merapi. Penulis menemukan simpulan sebagai berikut; *pertama*, warga memahami risikonya, memahami mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi erupsi Merapi, melalui pengelolaan informasi dan komunikasi kebencanaan berdasar pada deliberasi dan partisipasi warga. *Kedua*, kapasitas komunitas warga di KRB III ATL dalam menghadapi risiko bencana Gunung

Merapi berangkat dari sebuah pengelolaan persepsi, pengetahuan dan juga budaya masyarakat setempat. Ketiga, praktik komunikasi kebencanaan yang bersifat deliberasi partisipatif antara pemerintah dan komunitas warga dibangun dalam ruang-ruang komunikasi seperti forum warga, dan dalam bentuk komunikasi virtual melalui aplikasi pesan singkat Whatshapp, selebihnya kapasitas komunikasi dan informasi kebencanan dibangun melalui media yang sudah biasa mereka lakukan sebelumnya, yakni *handy talky* yang terhubung antara pemerintah terkait dan warga.

Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Deliberasi Partisipatif Informasi, Gunung Merapi

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara di kawasan rawan bencana. Indonesia berada di antara dua lempeng benua dan lempeng samudra, yakni Lempeng Eurasia, dan Lempeng Australia, serta Lempeng laut Filipina, dan Lempeng Pasifik. Dalam sebuah rilis BMKG, Indonesia mempunyai 295 sesar aktif yang tersebar di seluruh Indonesia (Dzulfaroo, 2021). Tidak hanya itu, Indonesia juga berada di Cincin Api Dunia. Ada 127 gunung aktif di Indonesia (Magma Indonesia, 2021) dan menjadi negara dengan korban tewas terbanyak untuk erupsi gunung api. Maka jika dilihat dari posisi tersebut, Indonesia nyata merupakan wilayah rawan bencana.

Bencana tsunami Aceh tahun 2004, kemudian disusul gempa bumi Yogyakarta dan Klaten tahun 2006 memaksa Indonesia untuk serius memperhatikan isu-isu kebencanaan. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan lahirnya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lahirnya UU Penanggulangan Bencana merupakan respons dari isu kebencanaan di dunia saat itu yakni Hygo Framework for Action (HFA) 2005-2015 (United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction, 2005). Namun,

HFA banyak dikritik karena hanya menyinggung pada konteks kedaruratan dan juga pembangunan pascabencana. HFA dianggap tidak begitu fokus pada pengurangan risiko bencana. Maka dari itu, muncul *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (“Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,” 2015), di mana fokus penanggulangan bencana tidak hanya pada kedaruratan, dan rehabilitasi saja, namun juga pengurangan risiko bencana berbasis pada peningkatan kapasitas komunitas warga.

Isu pemberdayaan komunitas dalam pengurangan risiko bencana menjadi isu yang strategis untuk sekarang ini. Masyarakat di kawasan rawan bencana harus menjadi bagian yang dilibatkan dalam proses pengurangan risiko bencana (Husein, 2020). Melibatkan warga dalam proses pengurangan risiko bencana, berarti mengajak warga secara sadar bahwa mereka hidup di kawasan rawan bencana, mengetahui dan memahami risiko dan ancamannya, serta mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Secara global, Indonesia telah menjadi perhatian dunia dengan catatan bencana besarnya. Tengok saja erupsi besar Gunung Toba 74.000, Gunung Api Krakatau, Gunung Api Tambora dengan letusan terbesarnya pada tahun 1815 yang menurut saksi, laut layaknya hamparan pasir karena debu yang sangat tebal keluar dari Gunung Tambora (Novena, 2021), serta tsunami Aceh tahun 2004. Erupsi Gunung Krakatau dan Gunung Tambora merupakan erupsi terbesar yang tercatat dalam sejarah, dengan VEI (Volcanic Explosivity Index) 7. Sebagai perbandingan, erupsi Merapi 2010 yang dianggap sebagai erupsi besar 150 tahun sekali (BPPTKG, 2020), hanya mencapai VEI 4.¹

Sebagai wilayah di Cicin Api Dunia, risiko bencana alam gunung api menjadi salah satu yang penting mendapatkan perhatian dalam pengurangan risiko bencana, salah satunya adalah Gunung Merapi (Atmojo, 2020). Rerata lima tahun sekali Gunung Merapi meletus, entah dalam bentuk erupsi *effusive* maupun eksplosif. Erupsi *effusive*

¹Wawancara dengan Hanik Humaida-BPPTKG.

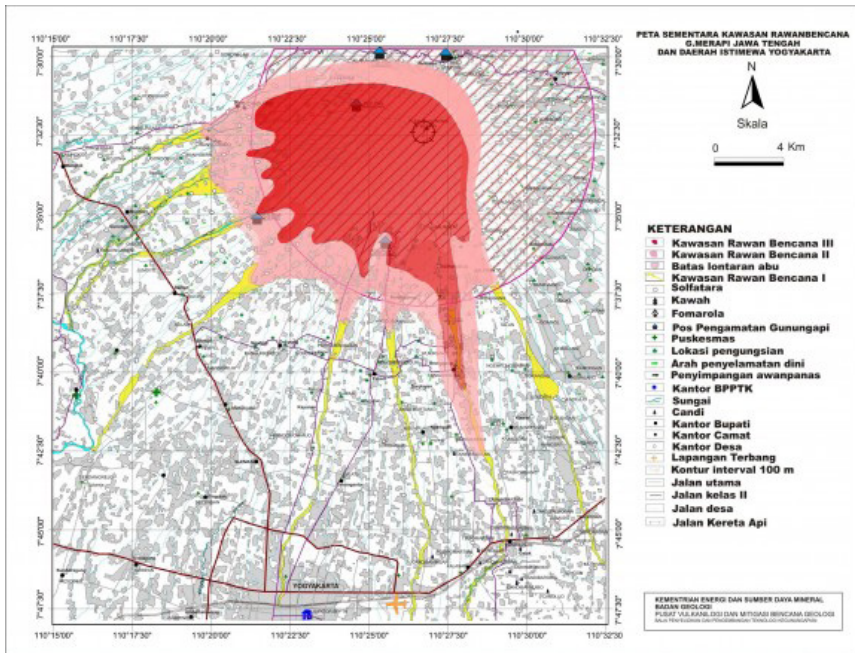
adalah sebuah erupsi di mana material keluar dari kawah secara terus menerus, dan sering disebut gunung tipe strombolian (Andronico & Lodato, 2005), material yang keluar tidak begitu berbahaya, karena hanya di sekitar gunung saja (Cassidy, *et al.*, 2018). Erupsi *effusive* dan eksplosif sebenarnya mempunyai proses yang hampir sama, yakni runtuhnya kubah lava, deformasi (menggelembungnya badan gunung), dan terdeteksi kegempaan. Hanya saja eksplosif ditambah dengan kekuatan gas yang lebih besar. Saat kubah terbuka, maka gas keluar dengan besar hingga mengeluarkan material ke segala arah (Cassidy, *et al.*, 2018).

Pencatatan erupsi gunung api pertama kali di pulau Jawa dilakukan oleh pihak kolonial. Pencatatan pertama adalah erupsi Merapi tahun 1672, dengan korban 3000-an jiwa (Sulistiyorini, 2001). Sebelum tahun 1600-an, erupsi Merapi tidak pernah tercatat dengan baik, hanya ditafsirkan melalui jejaknya di prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Jawa (Zaki, 2015).

Saat artikel ini ditulis, gunung api Merapi sudah 36 kali meletus jika dihitung dari 300 tahun terakhir. Gunung Merapi menjadi pusat perhatian setelah letusan tahun 2010. Di mana erupsi tahun 2010 adalah erupsi paling dahsyat dan merusak daripada erupsi sebelumnya. Dilansir dari BPPTKG (2020), Gunung api Merapi saat itu mampu memuntahkan material vulkanik hingga mencapai 140 juta m³ (Budiani & Nugraha, 2014).

Kawasan yang langsung terdampak awan panas kemudian sering disebut dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III ATL (Area Terdampak Langsung). KRB III adalah Zona kawasan rawan bencana III, sebuah zona kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran atau guguran batu (pijar), dan gas beracun (Budiani & Nugraha, 2014). Area Terdampak Langsung (ATL) adalah sebutan untuk KRB III yang terdampang langsung awan panas. Karena ada kawasan yang masuk dalam KRB III, namun tidak terkena awan panas dan tidak direlokasi.

Pada dasarnya, zona KRB III direkomendasikan tidak dihuni dan untuk aktivitas banyak manusia. Penzonaan dilakukan hanya pada gunung aktif yang masih sering meletus. Maka dari itu sebagian desa di kecamatan Cangkringan idealnya bebas dari aktivitas manusia. Hal ini berdasar pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kawasan rawan tidak boleh ditinggali. Namun kenyataannya tidak demikian, dikarenakan salah satunya karena mendekati sumber ekonominya—beberapa dusun mengandalkan sumber ekonomi dari pariwisata, selebihnya adalah peternak sapi perah—maka, mayoritas masyarakat yang menjadi bagian dari bisnis wisata tersebut tetap memilih tinggal di KRB III ATL, menempati rumah yang sebelumnya telah hancur dilanda awan panas.



Gambar 1. Peta Zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi Mengacu Erupsi 2010

Sumber: BPBD Sleman 2017

Seperti dilihat pada gambar 1, zona Kawasan Rawan Bencana dibuat dalam tiga warna, yakni merah, merah muda dan kuning. Merah untuk keterangan KRB III, sedangkan KRB II diterangkan dalam warna merah muda, dan KRB I diterangkan dalam warna kuning. Jika diamati bentuk zona KRB seperti ubur-ubur, hal ini dikarenakan zona KRB mengacu pada luncuran material erupsi dan aliran awan panas.

Pasca-2010, wilayah Desa Umbulharjo, khususnya di Dusun Pangukrejo, Pelemsari, Ngrangkah, Kinahrejo, dan sebagian bekas wilayah Desa Kepuharjo sudah tidak mendapatkan jatah pembangunan pemerintah karena masuk dalam KRB III ATL. Menyadari hal tersebut masyarakat berupaya secara mandiri mengelola sumber keuangan untuk pembangunan wilayahnya secara ekonomi dan sosial, serta dalam bentuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menghadapi erupsi Gunung Merapi.

Volcano tour menjadi salah satu imbas dari mengapa warga masih mendiami KRB III ATL selain karena peternakan. Menurut Kepala Dukuh Pangukrejo, (sebuah pedukuhan paling padat di KRB III ATL Gunung Merapi bagian selatan yang terdampak langsung awan panas) Subagio Hadi mengatakan bahwa sekitar 80% warga Pangukrejo bekerja di bidang pariwisata, sisanya peternak sapi dan penambang pasir—sebelum terjadi pandemi 2020-2022.

Bagi peternak sapi penegasan Kawasan Rawan Bencana III di wilayahnya menjadi kendala bagi mereka. Relokasi ke Hunian Tetap yang hanya mendapatkan 150 m² per KK tentu tidak sesuai dengan kondisi mereka semula. Sebelumnya rerata warga memiliki lahan atau rumah sekitar 500-1000 m² yang ideal untuk membangun kandang sapi. Karena di Huntap lahan tidak mencukupi, maka sebagian warga memilih untuk kembali ke rumah mereka sebelumnya.

Bagi warga Dusun Pangukrejo yang masih memiliki infrastruktur listrik dan air, akan lebih memilih untuk kembali ke rumah mereka sebelumnya. Hal ini berbeda dengan warga Kepuharjo yang mau

tidak mau tetap di Huntap karena kawasannya tidak mendukung kehidupan, misal air dan listrik. Fenomena kembalinya warga yang memilih tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III ATL jelas memiliki kerentanan yang lebih besar daripada masyarakat yang tinggal diluar zona KRB III. Terlebih lagi peristiwa erupsi 2010 telah memberikan banyak bukti bahwa rentannya warga dalam menghadapi ancaman Gunung Merapi. Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Nurjanah, Sugiharto R, Kuswanda D, BP Siswanto, 2013). Peristiwa Dusun Turgo 22 November tahun 1994 yang menewaskan 64 jiwa misalnya, adalah peristiwa yang masih terus menjadi objek yang menarik untuk didiskusikan. Ada banyak aspek yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa Turgo terjadi. Satu sisi terkait dengan sistem informasi komunikasi mitigasi yang buruk saat itu, dan sisi yang lain terkait dengan kepercayaan yang melingkupi masyarakat Turgo (Dove, 2008). Menurut BPPTKG (2018) bencana Turgo bisa dikaitkan dengan masalah infrastruktur komunikasi informasi kala itu. Teknologi belum secanggih sekarang ini, proses informasi yang sangat lambat, serta akses yang minim terhadap informasi.

Fenomena migrasi warga ke KRB III ATL khususnya di Dusun Pangukrejo misalnya menjadi subjek yang menarik untuk didiskusikan. Terkait dengan bagaimana pengelolaan informasi dan komunikasi risiko bencana yang dihadapi warga yang tinggal di KRB III ATL.

B. Pembahasan

Banyak perspektif dalam kajian komunikasi kebencanaan, namun dalam artikel ini, penulis mencoba berangkat dari pendekatan studi komunikasi kebencanaan dari perspektif komunikasi risiko. Jayasekara (Jayasekara, 2019) menjelaskan bahwa komunikasi bencana pada dasarnya adalah kajian komunikasi risiko. Komunikasi

risiko adalah pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan tentang sifat, besaran, signifikansi, atau kendali suatu risiko (Covello, 2017). Kajian terkait komunikasi risiko seperti yang dijelaskan oleh Reynold dan Seeger banyak ditemukan dalam bencana alam (Taylor, et al., 2005). Seperti halnya penulis Amerika lainnya kajian komunikasi bencana banyak diilhami oleh riset-riset komunikasi kesehatan, atau komunikasi risiko yang terkait dengan bencana-bencana kesehatan, semisal penanganan bencana antrax, SARS, atau flu burung.

Coppola dan Maloney (Coppola & Maloney, 2009) dalam bukunya berjudul *Communicating Emergency Preparedness* menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam edukasi kesiapsiagaan bencana dalam pendekatan komunikasi risiko (2009: 16-17); yakni menaikkan kesadaran publik atau warga terkait dengan ancaman bencana. *Kedua*, mengarahkan perilaku masyarakat, seperti apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, bagaimana mempersiapkan menghadapi bencana, bagaimana tanggap bencana yang dilakukan saat darurat, dan bagaimana saat dilakukan *recovery* pascabencana.

Hampir sama dengan apa yang dijelaskan di atas, Shaw dan Gupta (Shaw & Gupta, 2009) menjelaskan edukasi bencana dalam pendekatan komunikasi informasi bencana adalah: 1) saat tidak terjadi bencana, 2) sebelum bencana terjadi, 3) saat bencana, dan 4) setelah bencana.

Penekanan dalam Haddow dan Haddow (Haddow & Haddow, 2009) cukup jelas bahwa komunikasi bencana banyak difokuskan pada komunikasi publik, khususnya dalam diseminasi informasi bencana. Hal ini juga yang menjadi acuan penulis dalam melihat perspektif komunikasi bencana dalam penulisan yang dilakukan, yakni terkait komunikasi publik dan diseminasi informasi bencana.

Jika melihat bagaimana peran komunikasi bencana yang disampaikan oleh Haddow dan Haddow (Haddow & Haddow, 2009), maka ada lima pilar penting dalam strategi komunikasi bencana

(2009: 2-3) yakni: a) *customer focus*, b) *leadership commitment*, c) *inclusion of communication in planning and operation*, d) *situational awareness*, e) *media partnership*.

Di era sekarang, *media partnership* tidak lagi hanya menggandeng media massa untuk mendeliver informasi kepada publik. Berkembangnya media baru serta tawaran teknologi informasi dan komunikasi yang murah membuat masyarakat secara organik mampu membentuk media mereka sendiri. Seperti JALIN Merapi yang merupakan jurnalis warga yang fokus dalam komunikasi bencana respons Gunung Merapi.

Memang tidak semua komunitas secara inisiatif membangun media alternatif dalam repsons bencana. Namun, dalam pilar strategi komunikasi bencana seperti yang dijelaskan Haddow dan Haddow (Haddow & Haddow, 2009), perkembangan teknologi media komunikasi dan informasi yang sangat terbuka ini memungkinkan kesempatan melibatkan peran masyarakat komunitas dalam diseminasi komunikasi informasi bencana.

1. Erupsi Merapi 1994 dan 2010

Diskusi ini akan diawali dengan erupsi 2010 dengan pertanyaan mengapa erupsi 2010 sedemikian banyak yang tewas? Bisa jadi salah satu jawabannya adalah karena akses komunikasi yang terlambat. Menurut Noer Cholik dari BPPTKG sebenarnya pengelolaan komunikasi kebencanaan sudah terintegrasi secara struktural dan sudah berjalan dengan baik. Namun, justru komunikasi yang langsung ke masyarakat malah yang tidak begitu diperhatikan. Padahal masyarakatlah yang menjadi subjek yang terancam. Maksud komunikasi kebencanaan yang terintegrasi secara struktural adalah informasi struktur dari pemerintah daerah ke kecamatan, kemudian ke kepala desa, dan kemudian ke kepala dukuh atau ketua RT.

Mengacu pada korban erupsi 2010, maka ketidakmampuan akses komunikasi dan informasi bisa menjadi bagian dari kerentanan. Hal ini juga diamini oleh Sinam, (ketua JRKI-Jaringan Radio Komunitas

Indonesia—yang juga aktivitas JALIN Merapi) yang mengatakan bahwa komunikasi darurat bencana yang terlambat sampai ke warga sangat rentan memakan korban jiwa. Sinam mencontohkan erupsi Merapi 1994 yang menerjang Dusun Turgo adalah akibat komunikasi kebencanaan dalam bentuk kesiapsiagaan yang terlambat. Peristiwa Turgo-lah yang kemudian menyadarkan banyak warga betapa pentingnya infrastruktur informasi dan komunikasi kebencanaan di tingkat warga. Peristiwa ini juga yang mengilhami berdirinya radio komunitas di sekitar Merapi. Pada erupsi 2006 radio-radio tersebut kemudian mendirikan JALIN Merapi (Afrizal, *et al.*, 2007).

2. Kolaborasi Warga dalam Komunikasi Kebencanaan

Bentuk kolaborasi dan dialogis antara pemerintah dan masyarakat dibentuk tidak dengan kondisi formal birokratis, namun dibentuk dengan pendekatan informal, seperti perkumpulan warga, atau komunikasi informal melalui media telpon atau aplikasi WaG. Bagi para pegiat sosial di Merapi pembelajaran dalam bencana yang paling efektif tetap pertemuan warga. Efektif karena bertemu langsung, bertatap muka, dan berinteraksi langsung.



Gambar 2. Bentuk Perkumpulan Warga yang Rutin Dilakukan oleh Pemerintah, Khususnya BPPTKG, BPBD, dan Pemerintah Desa dalam Respons terhadap Ancaman Merapi

Sumber: Foto BPPTKG, 2018

Pertemuan warga mempunyai tanda yang signifikan. Giddens (Giddens, 2010) menyebutnya dengan adanya pertemuan muka, kita tidak hanya sebatas interaksi semata, di dalamnya ada tanda yang timbul yakni mencerminkan suatu nilai penting yang tidak ditemui dalam hubungan bukan tatap muka, seperti merasa diterima dalam lingkungan tersebut, merasa diperhatikan perannya dan sebagainya.

Namun, kekurangan pertemuan warga adalah keterbatasan waktu dan jangkauan. Karena tidak sedikit jangkauan yang akan dicapai. Jika diambil perwakilan, seperti kepala desa atau kepala dukuh, maka tumpuan informasinya ada pada tokoh-tokoh tersebut. Jika kapasitas dalam memahami pengetahuan kebencanaan rendah, maka informasi yang disampaikan pun berkualitas rendah.

Namun jika merujuk pada konsep strukturasi yang ditawarkan Giddens, tetap bahwa pertemuan muka adalah penting, karena bagian dari bentuk integrasi sosial (Giddens, 2010), dan sebaliknya integrasi sistem adalah relasi yang dibangun berdasarkan kondisi ruang dan waktu yang lebih luas (tidak membutuhkan pertemuan langsung). Maka dalam pengelolaan informasi, harus juga membangun kondisi komunikasi tatap muka, selain juga memperkuat integrasi sistem.

Kolaborasi komunikasi kebencanaan antara pemerintah dan warga, dan hubungan dialogis yang egaliter dalam PRB menguatkan hubungan saling percaya yang baik antarkeduanya. Nur Cholis staf BPPTKG saat melakukan survei pada tahun 2012 mengatakan bahwa warga merasa aman dengan perhatian pemerintah terhadap mereka. Salah satu warga menyebut, *“sing penting nang kene kuwi waspada mas, wayahe rep njeblug ya komunikasi sing nang nduwur dengan pemerintahan wis evakuasi (artinya yang penting waspada, saat waktunya meletus ya komunikasi antara pejabat desa dengan pemerintah untuk evakuasi)”*.

Dari apa yang diutarakan di atas, maka kolaborasi dan dialogis dalam komunikasi kebencanaan di Gunung Merapi menjadi kebutuhan yang penting. Jika kolaborasi sudah dilakukan maka kebutuhan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas di kedua belah pihak.

3. Action Research: Simulasi Evakuasi Mandiri Erupsi Freatik Tahun 2017

Warga di Dusun Pangukrejo yang sebagian besar adalah pelaku wisata *Volcano Tour* berinisiatif membuat evakuasi mandiri menghadapi letusan freatik. Ide ini berangkat dari diskusi penulis dan beberapa warga tentang kasus letusan kawah Sileri Dieng beberapa bulan sebelumnya (di tahun 2017). Diskusi tersebut pada akhirnya membuahkan sebuah tindakan simulasi evaluasi mandiri menghadapi erupsi freatik. Berikut adalah data deskriptif tentang proses persiapan evakuasi mandiri hingga pada hari H pelaksanaan.

Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan warga masyarakat Pangukrejo, khususnya pelaku wisata di Pangukrejo. Hal yang dilakukan pertama kali pada tanggal 16 Oktober 2017 yaitu dengan mengundang para pakar kebencanaan, perwakilan pemerintah dan juga akademisi.



Gambar 3. Noer Cholik dari BPPTKG yang Mencoba Menjelaskan Apa itu Erupsi Freatik serta Ancamannya

Tahap ini adalah tahap transfer pengetahuan. Tujuannya adalah membangun kesadaran warga akan ancaman Merapi, khususnya erupsi freatik. Pada forum tersebut kita mendatangkan Noer Cholik dari BPPTKG, Mart Widarto dan Bambang Hery dari Pujiono Center, dan peneliti sebagai keterwakilan akademisi. Ketiga, pembicara ini menjelaskan banyak hal tentang apa itu erupsi freatik, dan bagaimana dampaknya bagi warga dan pariwisata.

a. Membangun Kesadaran

Hal yang harus dilakukan sebelum menawarkan simulasi evakuasi menghadapi erupsi freatik adalah membangun kesadaran atas kondisi lingkungan yang rawan akan bencana alam, khususnya kawasan wisata rawan bencana, sadar akan kerentanannya, kemudian membangun kapasitas sekaligus membangun ketahanan masyarakat atas bencana.

Dalam sebuah kesempatan, Noer Cholik dari BPPTKG mengatakan bahwa letusan freatik memang tidak berbahaya, jangkauan materialnya hanya sampai 200 meter saja. Letusan freatik adalah letusan nonmagmatis atau kemudian disebut dengan letusan freatik atau letusan minor.² Erupsi freatik atau minor adalah letusan yang berbentuk gas, air, atau batu yang terfragmentasi, di mana batuan tercampur dan mencair (Kaneshima, *et al.*, 1996). Namun, yang menjadi berbahaya adalah saat warga maupun wisatawan tidak memahami apa itu erupsi freatik, dampaknya bisa jadi adalah kepanikan dan *chaos* di masyarakat atau di kawasan wisata. Belajar dari meletusnya kawah Sileri Gunung Dieng, kepanikan membuat sekitar 20 orang terluka karena tidak adanya pengelolaan dalam menghadapi letusan freatik. Hal ini juga terjadi di di Tangkuban Perahu pada 26 Juli 2019, terjadi kepanikan dan kondisi menjadi sangat *chaos*. Diskusi awal tanggal 16 Oktober 2017 membuka jalan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang risiko-risiko yang nanti bisa saja terjadi.

² Agus Budi, BPPTKG 20 Mei 2018.

b. Mempraktikan Pengetahuan

Pemetaan risiko menjadi kajian awal dalam membangun pengetahuan tentang bencana yang lebih praktis (tindakan). Khususnya mengenal secara detail kerentanan pada masyarakat di KRB III dan kerentanan di kawasan wisata. Pemahaman atas kerentanan bencana inilah yang kemudian menjadi rumusan dalam membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Disepakati kemudian simulasi evakuasi mandiri di Dusun Pangukrejo. Fokusnya adalah pada simulasi terjadinya letusan freatik.



Gambar 4. Persiapan Simulasi Evakuasi Mandiri Dusun Pangukrejo dalam Menghadapi Letusan Freatik pada Tanggal 23 Oktober 2017, serta Rencana Aksi Simulasi Mandiri Dusun Pangukrejo

Simulasi ini disepakati pada hari Minggu tanggal 5 November 2017. Pada simulasi tersebut dibuat dalam beberapa titik kumpul evakuasi warga seperti di parkir besar, pos jeep Merapi Jaya, Grinata, MLCC, dan sebagainya, lalu dievakuasi ke barak pengungsian yang sudah disediakan di Hunian Tetap (Huntap) Plosokerep. Sebelah utara Desa Umbuharjo di wilayah KRB II. Dari

kondisi letusan freatik hingga ke Huntao Plosokerep membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit.



Gambar 5. Proses Persiapan Simulasi Evakuasi Mandiri Dusun Pangukrejo

Simulasi berjalan cukup sukses dengan tidak ada kendala yang berarti. Masyarakat yang dilibatkan sekitar 200 orang. Masing-masing RT membawa 20 orang untuk simulasi tersebut.

Evaluasi

Dari simulasi evakuasi tersebut kemudian dievaluasi. Ada beberapa yang menjadi penting untuk dievaluasi, yakni pentingnya suara masjid sebagai salah satu dari *early warning system*. Speaker atau bisa disebut TOA menjadi salah satu cara warga mendapatkan peringatan, khususnya bagi lansia.

4. Belajar dari Erupsi Freatik Tahun 2018: Proses Komunikasi Kebencanaan Warga di KRB III ATL

Benar adanya, enam bulan setelah simulasi mandiri erupsi freatik bulan November 2017, tiba-tiba Gunung Merapi erupsi freatik. Erupsi freatik terjadi pada 11 Mei 2018 diteruskan 21 Mei hingga selesai pada bulan Agustus 2018 (Budiman, 2018). Penulis merasa

penting memasukkan peristiwa erupsi freatik ini untuk membuka kesempatan terkait bagaimana praktik penguatan kapasitas masyarakat pelaku wisata di KRB III ATL. Erupsi freatik tanggal 11 Mei 2018 adalah erupsi freatik yang ke-7 pascaerupsi 2010. Erupsi freatik yang pertama adalah 15 Juli 2012, kemudian 22 Juli 2013, 18 November 2013, 10 Maret 2014, 27 Maret 2014, dan 20 April 2014. Menurut Agus Budi Santoso pakar Vulkanologi dari BPPTKG, dari semua erupsi freatik yang terjadi selama pascaerupsi 2010, letusan freatik 18 November 2013 lah yang paling besar.³

Bagi Agus Budi Santoso Vulkanologi dari BPPTKG mengatakan bahwa letusan freatik itu sesungguhnya tidak begitu berbahaya, karena radiusnya tidak luas dan materialnya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Walaupun hujan abu, arah angin akan menentukan arah abu itu kemana, hanya yang membuat erupsi freatik terlihat berbahaya karena meletus dengan tiba-tiba dan tidak ada peringatan dini. Dari dampak sosial yang besar pada 11 Mei 2018, BPPTKG kemudian mulai memperhatikan mitigasi freatik, tidak hanya mitigasi erupsi magmatik saja.

Hambatan terbesar sulitnya peringatan dini dalam erupsi freatik adalah parameter letusan yang berbeda-beda antara letusan satu dengan lainnya.

“Bahwa di antara beberapa parameter yang kita duga bisa menjadi prekursor, dan ternyata itu tidak konsisten, dari satu letusan ke letusan yang lain. Misal yang satu letusan didahului oleh gempa VT, yang lain tidak. Yang satu dipengaruhi oleh hujan, yang lain tidak. Jadi ada beberapa parameter yang kita duga merupakan indikasi tapi itu tidak konsisten. Jadi kita tidak bisa pegang parameter itu kemudian kita tidak punya jaringan dasar untuk peringatan dini, tidak bisa”⁴

³ Agus Budi Santoso, BPPTKG, 20 Mei 2018.

⁴ *Ibid.*

Peristiwa erupsi freatik di Merapi cukup jarang terjadi. Mengacu pada sejarah erupsi freatik selalu diawali oleh erupsi magmatik yang besar. Di tahun 1930 dan 1972 pernah terjadi erupsi magmatik yang cukup besar layaknya erupsi 2010. Pascaerupsi 1930 terjadi beberapa erupsi freatik seperti pada tahun 1933. Menurut data erupsi magmatik 1930 diikuti erupsi magmatik selanjutnya adalah tahun 1941, yakni 11 tahun setelahnya. Pada erupsi 1972, bertemu lagi erupsi magmatik selanjutnya yakni sembilan tahun kemudian, atau pada tahun 1981. Waktu itu, Agus Budi Santoso belum bisa memprediksikan kapan erupsi freatik bakal selesai. Apakah pascaerupsi 2010 mengikuti erupsi 1930 atau erupsi 1972. Walau akhirnya bulan Agustus 2018 ada kabar gembira sekaligus kabar buruk, kabar baiknya erupsi freatik dinyatakan usai karena munculnya kubah lava yang membuktikan bahwa sudah mulai proses erupsi magmatik. Kabar buruknya adalah warga harus mulai siapsiaga menghadapi erupsi magmatik.

Penulis merasa momen freatik adalah kondisi terbaik untuk melihat apakah simulasi yang dilakukan pada bulan November 2017 berdampak pada pemahaman warga di Dusun Pangukrejo dan pelaku wisata *Volcano Tour*. Penulis melakukan wawancara dengan takmir masjid Nur Iman yang merupakan masjid ketiga terdekat dari puncak di wilayah kawasan *Volcano Tour* KRB III ATL.

Suripto mengatakan pada saat erupsi freatik, masjid Nur Iman tidak menggunakan TOA (speaker) untuk mengumumkan kondisi darurat kepada warganya. Intinya tidak ada komando untuk mengumumkan kabar darurat, “*Kalau secara toa nggak, kita sih biasa ya, kita lihat perkembangan situasi perkembangan*”, kata Suripto (laki-laki, 47 tahun). Samtioso (laki-laki, 54 tahun) mengatakan bahwa menggunakan TOA sepertinya sudah tidak perlu lagi setelah alat komunikasi yang semakin modern.⁵

Samtioso mencoba membandingkan antara kondisi 2010 dan sekarang. Baginya teknologi komunikasi bisa membuat koordinasi

⁵ Samtioso, Warga Pangukrejo, 8 November 2018.

semakin praktis. Sebelum erupsi 2010, berkumpul adalah cara masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi dan instruksi, namun di era sekarang dengan menggunakan *smartphone*, warga sudah bisa mendapatkan informasi tanpa harus berkumpul terlebih dahulu.

Namun, bukan berarti tradisi pengelolaan informasi dan komunikasi di era sebelumnya hilang begitu saja. Samtioso paham betul bahwa media dalam penanggulangan bencana mempunyai karakter dan kebutuhannya masing-masing. Ia masih menggunakan *handy talky* hingga sekarang ini. Walaupun dianggap tidak begitu penting bagi Suropto, TOA masjid masih cukup signifikan untuk penyebaran informasi target lansia. Untuk level usia tua, TOA masjid menjadi sangat penting posisinya, karena usia tua jarang yang mempunyai *smartphone* dan natif dalam menggunakan *smartphone*. Usia tua yang dimaksud oleh Suropto adalah orang umur 55 tahun ke atas.

Bagi Suropto, TOA atau speaker masih cukup penting untuk kedaruratan karena tidak semua orang punya HT, dan tidak semua orang yang punya HT dekat posisinya dengan HT-nya. Misal HT tersebut tidak diaktifkan, atau tidak di-*setting* frekuensinya. Seingat Suropto pada erupsi 2010 TOA masjid digunakan pada tanggal 26 Oktober setelah selesai salat Maghrib, hampir bersamaan dengan suara sirene.

Pada dasarnya masyarakat sudah cukup memahami setiap alat komunikasi yang mereka miliki. Setiap alat mempunyai perannya masing-masing. Misal Whatsapp adalah cara masyarakat berkomunikasi dengan intens satu komunitas. Beberapa bisa berkomunikasi intens dengan pihak eksternal. Sosial media seperti Twitter atau Facebook adalah pelengkap informasi, seperti acuan informasi pengetahuan tambahan. HT digunakan dalam memantau kondisi darurat, normal dalam pemantauan cuaca, dan mengamati sinyal seismik Gunung Merapi. HT juga digunakan sebagai pelengkap *smartphone* sekarang ini dalam komunikasi dan informasi, terutama dalam kondisi tidak adanya sinyal *handphone* di lokasi tertentu.

Suripto adalah beberapa sosok warga yang sumber ekonominya tidak pada wisata. Walau bukan pelaku wisata, namun kemampuan dalam menggunakan media komunikasi juga tetap harus mahir. Sebagai peternak sapi setiap hari mereka harus pergi ke hutan untuk merumput (*ngarit* dalam bahasa lokal). Dalam hutan TNGM, tidak ada sinyal *handphone*, maka HT sangat penting perannya. Maka saat erupsi freatik 2018 hampir semua orang yang merumput ke hutan selalu membawa HT.

5. Kekuatan Komunitas dalam Komunikasi Informasi PRB

Hal yang paling mendasar mengapa peran organisasi dan kelompok komunitas warga sangat penting dalam penguatan kapasitas adalah karena sikap individualistis adalah bagian dari kerentanan (Kholis, 2017). Seperti yang telah diulas sebelumnya, saat pesan sudah sampai pada masyarakat, maka hal yang dilakukan selanjutnya oleh individu-individu adalah berkomunikasi dengan kelompoknya untuk menanggapi pesan tersebut. Kelompok atau komunitas adalah struktur di atas individu sebagai sebuah struktur cair yang mengakomodir pemahaman para warga. Praktik kelompok dibangun melalui perkumpulan warga, kelompok ronda, kelompok pelaku wisata, frekuensi radio desa, dan WaG (Whatsapp Group).

Kelompok juga menjadi media alternatif bagi individu yang tidak mampu menguasai media tertentu dalam mendapatkan pesan informasi. Semisal seorang warga tidak mempunyai *smartphone* dan mengakses WaG, maka akses informasi dan klarifikasi informasi bisa ia dapatkan melalui medium kelompok. Kantung-kantung kelompok yang terorganisir inilah yang mempermudah saluran komunikasi informasi yang langsung ke masyarakat di KRB III ATL. Pesan-pesan PRB akan tersebar ke kelompok, dan kelompok cepat menyebar ke individu. Peran aktif kelompok-kelompok ini akan menekan kerentanan bencana. Berdirinya kelompok-kelompok warga juga secara tidak langsung menjadi forum dialogis yang secara alamiah mampu meningkatkan kapasitas mereka menghadapi bencana.

Kelompok yang terorganisir dengan kelompok organisasi adalah dua hal yang berbeda. Kelompok terorganisir adalah kelompok yang dikendalikan, ada struktur walau tidak perlu harus terlalu rapih, dan bisa dimobilisasi. Kelompok organisasi adalah sebuah struktur hirarki organisasi yang mempunyai manajemen organisasi, dan tujuan organisasi. Organisasi kebencanaan seperti dalam Destana (Desa Tangguh Bencana) memerlukan pembentukan organisasi tanggap bencana.

Berikut adalah perbedaan yang coba penulis buat dalam konteks kebencanaan dalam sebuah tabel:

Tabel 1. Perbedaan Kelompok Komunitas Warga dan Organisasi Kebencanaan Tingkat Warga

Kelompok Komunitas Warga yang Terorganisir	Organisasi Kebencanaan Warga
Mampu dikendalikan	Kemampuan dalam mendapatkan data dari sumber yang dipercaya
Mampu dimobilisasi	Mampu mengelola informasinya dan menyebarkannya
Mempunyai aktivitas komunikasi yang rutin	Mampu mengambil keputusan
Kesamaan nasib	Mampu mengelola manajemen bencana
Medium Individu bertemu dan berinteraksi	Bersifat koordinasi
Medium klarifikasi informasi	
Medium mendapatkan pengetahuan	

Warga di KRB III ATL sudah membangun upaya komunikasi yang baik dengan lembaga yang mewakili pemerintah, seperti BPPTKG, BPBD dan juga pemerintah dari tingkat pedukuhan hingga tingkat yang lebih tinggi. Penulis membagi komunitas dalam dua jenis, seperti apa yang ada di tabel 1. BPPTKG, BPBD dan juga pemerintah

menjadi sumber informasi utama, sekaligus sebagai bagian dari rekomendasi-rekomendasi.

Hubungan komunikasi dan informasi antara komunitas dan pemerintah adalah dalam bentuk kolaborasi. Karena pemerintah dan juga komunitas warga mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang pada akhirnya harus saling berkolaborasi. Seperti yang selama ini dilakukan, semisal terkait dengan pemantauan lahar hujan, pemantauan banjir dari hulu sungai, pemantauan puncak gunung dan sebagainya, semuanya dilakukan oleh kelompok warga, bukan lembaga pemerintah karena faktor lokasi pemantauan lebih dekat pada warga daripada pemerintah. Hasil pemantauan warga tersebut lalu disebarakan ke komunitas dan juga ke pemerintah terkait.

6. Komunikasi Kebencanaan Berbasis Kewargaan Versus Komunikasi Bencana ala Media Massa

Dari apa yang sudah dibahas di atas, maka ada sebuah pendekatan yang berbeda-beda dalam pengelolaan komunikasi kebencanaan. Pada masa sebelum teknologi komunikasi dan informasi secanggih sekarang ini, masyarakat Merapi harus menunggu informasi dari Jakarta untuk mengetahui informasi tentang Merapi. “*Jadi kita harus nonton TV, TV-nya liputan di Merapi, disiarkan ke Jakarta dulu, baru datang, padahal kita di Merapi*”, tutur Sinam.⁶ Birokrasi informasi yang panjang cenderung tidak efektif, ini yang kemudian membuat warga di sekitar Merapi membuat JALIN Merapi, sebuah komunitas komunikasi di kawasan lereng Merapi. JALIN Merapi adalah jaringan komunikasi komunitas radio komunitas MMC Boyolali, Lintas Merapi di Klaten, K Fm di Magelang, dan LSM (Afrizal, et al., 2007).

Dalam praktiknya, JALIN Merapi membangun jaringan komunikasi dan informasi berbasis komunitas yang kemudian disebut dengan *three o*, yang didalamnya adalah *on air* yang berarti siaran, *off air* berinteraksi langsung dengan komunitasnya dan *online* yang berupa data. Pengelolaan komunikasi dan informasi dimulai

⁶ Sinam, aktivitas JRKI JALIN MERAPI, 22 Agustus 2017.

dari data *online* yang bisa JALIN Merapi dapatkan melalui internet. *Off air* berarti mengambil informasi dari masyarakat komunitas, kemudian menyiarkan informasi tersebut kepada warga.

Pada erupsi 2010, semua televisi nasional lebih memilih pusat siarannya di Yogyakarta. Padahal pengungsi Yogyakarta tidak lebih banyak daripada Magelang dan Klaten. Ini yang kemudian membuat bantuan di Yogyakarta *overload* dan sebaliknya bantuan di provinsi Jawa Tengah mengalami kekurangan. Pada titik ini media massa nasional khususnya televisi tidak banyak membantu dalam penanggulangan bencana. Malah lebih sering melakukan blunder dengan membuat berita yang sensasional daripada membantu informasi kebencanaan (Junaedi & Sukmono, 2017). Ini yang juga dikritisi oleh Ahmad Arif dengan sebutan jurnalisme mendompleng atau *embedded journalism*, karena minimnya akses wartawan dalam mendapatkan informasi (medan yang dihadapi atau pengetahuan di lingkungan tersebut) (Arif, 2010) Maka wartawan lebih memilih sumber informasi yang lebih mudah didapat dan dengan akses yang mudah, dan yang termudah saat itu adalah terpusat di Yogyakarta.

JALIN Merapi sebagai media komunitas mencoba menjawab dengan mengelola jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan dalam kondisi normal maupun darurat. Dalam kondisi darurat JALIN Merapi mencoba menjadi pengawal informasi kebutuhan masyarakat di pengungsian pada saat itu. Pada tingkat ini ada edukasi yang coba JALIN Merapi lakukan; pertama terkait dengan pengaturan kebutuhan logistik, misal bagaimana komunitas atau lembaga yang mau membantu harus tahu kebutuhan pengungsi sebelum kemudian membantu. Hal ini untuk menghindari bantuan yang akhirnya menjadi sampah seperti di Stadion Maguwo, Yogyakarta. Di mana terjadi penumpukan makanan yang akhirnya membusuk, serta baju yang menggunung tidak terpakai (pernah menjadi *headline* Koran Kompas). Semua itu dilakukan oleh JALIN Merapi melalui radio siaran komunitas, dan internet (sosial media).

Permasalahan informasi PRB pada media massa karena beberapa faktor, *pertama*, sering kali wartawan yang meliput bencana, khususnya pada erupsi Merapi adalah kontributor berita yang minim pengetahuan tentang geologi, vulkanologi dan pengurangan risiko bencana. Kontributor adalah seorang yang ditugaskan di daerah oleh seorang redaktur media untuk mendapatkan data informasi sebuah peristiwa (Hidayat & Anisti, 2015). *Kedua*, peran editor atau redaktur yang terlalu besar dalam kebijakan *mem-framing* berita untuk kepentingan menjadikan produk berita yang menarik. Walaupun informasi dari wartawan di lapangan sudah sesuai dengan kaidah informasi pengurangan risiko bencana, namun di meja redaksi informasi bisa berkurang atau dimodifikasi untuk kepentingan media massa mereka. *Ketiga*, minimnya pengetahuan pengurangan risiko bencana pada level editor bisa mempengaruhi isi berita.

Dari fenomena tersebut di atas, penulis kemudian membuat gambaran tentang posisi media massa mainstream dan media komunitas dalam komunikasi kebencanaan di Gunung Merapi dalam pengalaman di periode erupsi 2006 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Media Massa Mainstream dan Media Komunitas dalam Penanggulangan Bencana

Media Massa Mainstream	Media Komunitas Warga (mengacu JALIN Merapi)
Memilih informasi yang paling banyak mendapatkan perhatian umum.	Interaktif.
Terpusat pada satu lokasi yang cukup populer.	Berjaringan, menyebar, tidak terpusat pada satu kawasan saja.
Mengikuti aturan jurnalisme sesuai tradisi redaksi secara umum.	Bersifat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan informasi di kawasan rawan bencana.
Konten melalui kebijakan redaksi yang jauh (di Jakarta), membuat media tidak terlalu paham kondisi di lapangan.	Dekat dengan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Hal ini berbeda jika kita mengkaji kasus Badai Katrina di New Orleans, Amerika pada tahun 2005. Peran media massa sangat kuat dalam kesiapsiagaan bencana dan juga setelah bencana (Haddow & Haddow, 2009). Seperti persiapan pembelian air bersih, persiapan stok makanan dan sebagainya. Di Amerika Serikat, media massa punya peran yang besar dalam memobilisasi massa dalam menghadapi bencana. Jika di Indonesia, khususnya di Merapi peran media massa diambil alih oleh media komunitas.

Jika menilik peristiwa Badai Katrina di New Orleans, mengapa peran media massa cukup signifikan? Selain karena peran media sebagai corong publik dipraktikkan dengan baik, juga karena karakter masyarakat New Orleans adalah masyarakat yang individualis (masyarakat urban), yang membutuhkan peran pihak ketiga dalam mengelola komunikasi dan informasinya. Berbeda dengan warga Merapi yang komunitarian yang secara organik mampu mengelola informasi dan komunikasi bencananya secara mandiri.

Karakter media sosial bisa membangun komunikasi kolaboratif antarlembaga dengan asas sifat egaliter dan terbuka, di mana warga bisa ikut berpartisipasi langsung, berdialog, dan berdiskusi. Sedangkan media massa sifatnya tidak kolaboratif, tidak interaktif, informasi tidak bisa diolah bersama-sama, terlembaga dengan cukup tegas, dimiliki modal, dan berorientasi profit.

7. Kapasitas Warga dalam Menghadapi Bencana di KRB III ATL Gunung Merapi

Erupsi freatik pada 11 Mei 2018 terjadi tiba-tiba dan membuat banyak kepanikan warga. Haryanto warga Dusun Deles, Klaten yang hanya sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi mengungkapkan bahwa suara letusanlah yang membuat warga panik. Suara tersebut mengingatkan kembali kepada erupsi 2010, namun kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana membuat masyarakat lebih siap menghadapi letusan yang tiba-tiba itu.

Menurut Haryanto, satu hal yang cukup penting dalam kapasitas dalam menghadapi bencana adalah penguasaan pengetahuan terhadap bencana. Satu hal yang penting bagi Haryanto adalah mendokumentasikan peristiwa tersebut dan membaginya ke grup Whatsapp seputaran Merapi. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan kepada yang lain. “Untuk berbagi informasi dan bukan untuk mencari sensasi,” ujarnya. Menyebarkan pesan informasi merupakan cara mereka meningkatkan kesiapsiagaan, menjadi hafal kondisinya dan harus melakukan apa. “Daripada tidak kami informasikan, tidak kami umumkan, akan muncul bencana baru yang tidak kami inginkan,” pungkasnya.⁷ Bagi Haryanto, tidak cepat menyebarkan pesan informasi peristiwa tersebut kepada khalayak luas bisa sangat riskan memunculkan bencana baru.

Melalui fenomena ini, penulis memahami pentingnya mendokumentasikan (mendata), membuat/menyeleksi informasi hingga kemudian mempublikasikan kepada khalayak khusus. Kapasitas tidak hanya bagi yang menyebarkan informasi, penerima informasi juga memerlukan kapasitas untuk menerima informasi tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Haryanto adalah sebagai berikut: semangat dalam mendokumentasikan informasi kebencanaan, mendata peristiwa bencana dan menjadikan informasi, kemudian dipublikasikan pada lingkup terbatas. Bagi penulis hal ini adalah bagian dari proses kecakapan dalam membuat sekaligus menerima informasi kebencanaan.

Pengetahuan bencana bisa dipahami berbeda-beda. Masyarakat bisa saja menginterpretasikan pengetahuan tersebut dengan gaya atau cara mereka. Sumprit dari Dusun Bakalan, sebuah dusun yang sudah direlokasi karena dampak 2010 mencoba menjelaskan apa itu erupsi freatik dari kacamata beliau; baginya erupsi freatik seperti balon “koyo tlembungan, balon, kemudian balonnya kesurep (mampat), nggak bisa keluar lama kelamaan akhirnya blug wis bar njelbug (setelah meledak) ya sudah ngembos, [...]”⁸

⁷ Haryanto, warga Dusun Deles, Sidorejo, 20 Mei 2018.

⁸ Sumprit, Dusun Bakalan, 20 Mei 2018.

Masyarakat mencoba semampunya memahami pengetahuan yang ditangkap oleh *stakeholder* dan para ahli dengan cara pandang mereka sendiri. Di satu sisi, hal ini mempermudah masyarakat memahami secara awam pengetahuan tersebut, namun di sisi lain pengetahuan yang dimodifikasi lebih sederhana bisa menghilangkan detail pengetahuan lain yang bisa saja cukup penting. Pengetahuan yang disederhanakan untuk pengurangan risiko bencana juga bisa dimaklumi. Semisal hanya memilih informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang lain. Seperti Mulyono pelaku wisata *Volcano Tour* yang harus tetap menjalankan jeep wisata walaupun Gunung Merapi tengah erupsi. Ia cukup mengetahui pengetahuan tentang aktivitas wisata tidak sampai 3 km dari puncak. “*Ya sing penting anjuran pemerintah. Radius waspada kuwi 3 km. 3 kilo tidak boleh ada aktivitas,*” kata Mulyono⁹. Bagi Mulyono, pengetahuan tentang erupsi freatik tidak perlu dipahami mendalam, ia memilih informasi untuk kepentingan dia saja, misal keamanan untuk wisata dalam status Waspada Merapi, seperti posisi aman menghindar dari awan panas.

Slogan *Living in Harmony with Disaster* adalah sebuah slogan sebagai solusi jalan tengah dua belah pihak (pemerintah dan warga yang memilih tinggal di KRB). Bagi banyak pengamat, slogan ini menjadi solusi dari problem yang terjadi di lingkup KRB III. Slogan tersebut adalah hal paling mudah mengintepretasikan sebuah pengetahuan bencana yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Saat berdiskusi dengan Elanto Wijoyo (2017) selaku aktivitas lingkungan dan fasilitator JALIN Merapi, penulis menanyakan apa esensi dari tagline *Living in Harmony with Disaster*. Dari diskusi panjang tersebut, penulis memahami bahwa *Living in Harmony with Disaster* bukanlah sebuah tagline yang dibuat dengan sengaja untuk memperkuat alasan warga tinggal di KRB III, namun lebih dari itu, *Living in Harmony with Disaster* adalah sebuah falsafah tentang cara masyarakat meliterasi dirinya dengan bencana di

⁹ Mulyono, Dusun Petung, 29 Oktober 2018.

lingkungannya. “Alam bekerja secara semestinya, manusialah yang harus memahami cara kerja alam,” tutur Elanto.

8. Berkumpul: Pola Komunikasi Kebencanaan Berbasis Masyarakat Komunitarian dalam Menghadapi Bencana

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pengetahuan menghadapi bencana secara personal cenderung akan ditangkap dalam interpretasi yang berbeda-beda. Namun, interpretasi dan persepsi tentang bencana bisa dibangun dalam interpretasi dan persepsi yang sama dalam ruang komunitas atau kelompok. Komunitas dan atau kelompok adalah medium yang tepat menyamakan persepsi terkait pesan informasi atau pengetahuan tertentu.

Widji (fotografer wisata, laki-laki, 56 tahun) adalah seorang pelaku wisata yang hidup bersama orang tuanya di KRB III ATL Pangukrejo. Seperti halnya warga Pangukrejo yang berusia lanjut, mereka tidak banyak menggunakan *smartphone* sebagai media komunikasi dalam menghadapi ancaman Merapi. Widji juga tidak mempunyai *handy talky* yang jamak dipunyai oleh warga. Menurut Widji panik adalah hal yang normal, namun pengetahuan atau kemampuan melihat kondisi Merapi adalah hal yang utama. Menurutnya harus siap dalam kondisi apapun, dan siap evakuasi.¹⁰ Widji menelaah pentingnya pengamatan pribadi dan pengamatan orang lain. Baginya, kebersamaan bersama warga menjadi penting dalam penanggulangan bencana. Berkumpul adalah bentuk klarifikasi pengamatan diri dan pengamatan warga yang lain. Berkumpul adalah praktik komunikasi bencana yang cukup efektif. Dengan berkumpul warga akan berdialog satu sama lain, serta saling mengklarifikasikan informasi dan pengetahuan. Hal ini akan meminimalisir risiko informasi hoaks dan informasi tidak jelas lainnya. “Yo ngko ngumpul-ngumpul karo kono dadi siji, mengko ngumpul dadi siji, nanti sekitar nganu yo ngko mudun bareng (ya nanti kumpul-kumpul dengan teman jadi satu, nanti kumpul

¹⁰ Widji, 19 November 2018.

jadi satu, nanti sekitar nganu ya nanti turun bareng),” jelas Widji. Dasarnya adalah pengamatan pribadi, yang kemudian diperkuat dengan medium berkumpul antarwarga untuk mendapatkan persepsi atau intepretasi yang sama.

9. Siaga Merapi: Naiknya Status Siaga Merapi 2020

Pada 5 November 2020, Merapi dinaikan statusnya menjadi Siaga (Level III). Status Siaga ini tentu saja merubah rekomendasi awal saat masih berstatus Waspada. Misal tidak boleh mendekati puncak di radius 3 km. Dalam status Waspada ini, semua aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya, termasuk dengan wisata *Volcano Tour* yang masuk dalam KRB III ATL.

Beberapa wilayah direkomendasikan untuk diungsikan. Pengungsi diprioritaskan pada warga rentan, seperti anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Selain itu, BPPTKG juga merekomendasikan menutup penambangan pasir di wilayah KRB III. Wisata juga dihimbau untuk menutup aktivitas wisata di wilayah KRB III, termasuk pendakian menuju puncak. Rekomendasi yang dikeluarkan BPPTKG menjadi acuan pemerintah dan juga lembaga terkait melakukan persiapan menghadapi kemungkinan erupsi Merapi.

Namun, bukan berarti tanpa hambatan. Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, pariwisata *Volcano Tour* sudah ditutup sebagian, yakni untuk Bunker Kaliadem dan juga Petilasan Mbah Marihan. Selebihnya, seperti Batu Alien, Museum Mini “Sisa Hartaku” masih terus berjalan. Walau masih dibuka, Subagio Hadi mengatakan bahwa *Volcano Tour* tetap seperti tidak ada aktivitas karena pengunjung juga turun drastis setelah naiknya status Waspada ke Siaga, belum termasuk kondisi dampak pandemi.

Pengelolaan evakuasi pengungsian di wilayah Klaten dan juga Yogyakarta perannya masih dipegang oleh relawan warga. Walau nampak ada peran BPBD atau Tagana namun pelibatannya tidak banyak. Pengelolaan penanggulangan bencana sementara banyak

dipegang oleh warga sendiri. Hal itu diperkuat oleh statemen Noer Kholik dari BPPTKG dan juga Mart Widarto. Mart Widarto yang juga seorang relawan mengatakan untuk status Siaga ini, ia banyak menghabiskan waktunya di kantor BPBD daripada di lapangan.

Pembatasan terkait relawan dari luar juga terkait dengan masih traumanya warga dengan orang yang berbaju jingga, selain juga terkait dengan aturan dalam pandemi. Terkait dengan traumatik dengan relawan dari BPBD yang berbaju jingga dikatakan oleh Noer Cholik dan juga oleh Subagio Hadi selaku Dukuh Pangukrejo dan pelaku wisata *Volcano Tour*:

Tapi intinya lebih cenderung relawan itu justru sewaktu masyarakat membutuhkan. *Nek urung-urung wis do nylempung* (kalau belum-belum sudah pada turun), masyarakat malah gugup, *keweden* (takut), tapi *nek* digiring relawan lokal, di bawah Pak RT atau Pemuda, itu biasanya lebih enak, lebih *enjoy*, *wong yo lewih penak* (orang juga lebih nyaman).

Nek opo yo wis alus, nek wis koyo opo, nek jenengen wis seragam-seragaman langsung do ngedrop. Nek masyarakat kan “ayo mbok de, ayo sumingkir” “ayo le ... yo le ...” lebih enak (kalau sudah halus, seperti apa pun, kalau namanya sudah seragam-seragaman langsung pada *nge-drop*. Kalau masyarakat kan “ayo bu de, ayo menghindar, “ya anaku ... ya anakku”).¹¹

Dari apa yang dikatakan oleh Subagio, untuk sementara relawan pengungsian dan evakuasi masih dilakukan oleh relawan lokal untuk tujuan menjaga psikologis warga. Apa yang dilakukan oleh warga Pangurkejo juga dilakukan warga Sidorejo, khususnya di Dusun Deles yang masih menutup diri dari relawan luar karena alasan pandemi. Melalui akun Twitter @SukimanMerapi

¹¹ Subagio Hadi, wawancara 29 November 2020.

ia mengatakan bahwa sementara ini mereka hanya melibatkan relawan lokal, untuk tujuan meminimalisir penularan pandemi dari luar.

Tampak peran relawan lokal merupakan bukti bahwa kapasitas warga sudah siap. Mereka sudah secara mandiri mengelola evakuasi hingga pada pengelolaan barak. Khusus untuk di wilayah KRB III ATL yang meliputi kawasan wisata *Volcano Tour* seperti Desa Umbulharjo dan Kepuharjo penyikapan terhadap penaikan status Waspada ke Siaga menurut observasi penulis sudah dikelola dengan cukup baik. Kepuharjo, misalnya, hampir semua warga sudah menetap di Huntap, yang berarti barak pengungsian Kepuharjo yang dulunya kantor kelurahan belum digunakan dengan semestinya. Untuk Desa Umbulharjo, yang berada di Pelemsari, Kinahrejo, dan Ngrangkah masuk ke huntap karena hampir semua warga mempunyai rumah di huntap. Jikapun tidak, biasanya sanak saudara yang tinggal di huntap akan menerima saudaranya yang belum mempunyai huntap.

Menurut Subagio Hadi, untuk status Siaga, hanya satu KK yang tidak mempunyai Huntap, dan tidak mempunyai sanak saudara di Huntap. Namun, Subagio Hadi mempunyai solusi dengan memasukan satu keluarga tersebut kepada tetangganya yang mau menerima mereka.

Terkait status Awas (Level IV), jika kemungkinan warga KRB III ATL harus mengungsi semua, maka Barak Pengungsian Klosokerep akan difungsikan dengan dibantu oleh relawan dari luar untuk koordinasi dan sebagainya. Diperkirakan ada sekitar 300 KK yang akan menempati Barak Pengungsian Plosokerep. Selebihnya akan masuk di Huntap milik sendiri, saudara, maupun tetangga yang mau menerima keluarga pengungsi.

10. Komunikasi Aktif: Pengelolaan Informasi Warga Menghadapi Erupsi Merapi

Subagio Hadi dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa inti dari semua kondisi dalam menghadapi bencana erupsi adalah kekuatan komunikasi dan koordinasi yang baik. Baginya untuk sementara ini pengelolaan informasi yang baik cukup membuat warga dan *stakeholder* tenang. Panik dan ketakutan jelas ada, namun hal itu bisa diminimalisir dengan penguatan informasi dan komunikasi, serta aktifnya relawan warga.

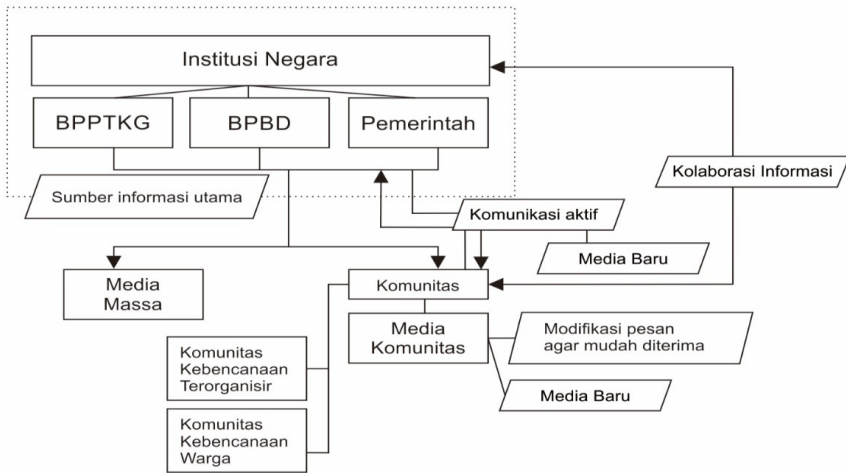
Komunikasi langsung kepada warga dari sumber utama informasi seperti BPPTKG mempunyai andil yang besar terhadap kesiapan warga dalam menghadapi erupsi Merapi. Selain itu, Subagio Hadi menyebutnya sebagai bentuk “komunikasi aktif”, yakni sebuah bentuk komunikasi yang menghubungkan langsung antara warga dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

“Sekarang kan sudah enak kan, informasi sudah sampai ke masyarakat. BPPTKG langsung diakses masyarakat, itupun kita menggunakan cara-cara komunikasi aktif. Tidak sekadar *moco*, ‘loh kok ngene?’”¹²

Komunikasi aktif selain menempatkan warga sebagai penerima informasi yang tepat, komunikasi aktif juga cara mengelola informasi agar mempunyai intepretasi yang sama terkait informasi. Pesan singkat seperti Whatsapp membantu hal tersebut agar informasi berjalan dengan baik. Sosial media masih terhambat oleh respons langsung admin, karena konten pesan yang disampaikan mencakup banyak audiens yang luas. Hal ini berbeda dengan Whatsapp atau telepon. Berikut adalah deskripsi sederhana dari uraian diskusi di atas dalam bentuk *flowcart*.

ProofRead
SB

¹² Subagio Hadi, Wawancara 29 November 2020.



Gambar 6. Alur Deliberasi Partisipasi Komunikasi dan Informasi Kebencanaan Berbasis Komunitas di KRB III ATL Gunung Merapi

C. Kesimpulan

Dari apa yang menjadi diskusi di atas, ada banyak hal yang menjadi temuan dan penting menjadi bahan diskusi selanjutnya, khususnya dalam kajian komunikasi bencana, khususnya lagi pada konteks komunikasi bencana pada isu-isu komunitas. Pada diskusi tersebut, penulis menemukan tiga point yang penting menjadi bahan diskusi pada ruang-ruang diskusi selanjutnya. *Pertama*, melalui deliberasi dan partisipasi informasi dan komunikasi bencana, komunitas warga di KRB III ATL memahami dan menguasai mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi erupsi Gunung Merapi. *Kedua*, kapasitas komunitas warga di KRB III ATL dalam menghadapi risiko bencana Gunung Merapi berangkat dari sebuah pengelolaan persepsi, pengetahuan dan juga budaya masyarakat setempat. *Ketiga*, Praktik deliberasi partisipatif dalam informasi dan komunikasi bencana dibangun dalam ruang-ruang yang bermacam-macam, seperti kelompok komunitas warga, forum warga, Whatsapp, dan *handytalky*. Aplikasi

pesan singkat seperti Whatsapp sekilas menggantikan peran forum warga, sekaligus merubah pola informasi dan komunikasi selama ini yang hanya bisa diakses oleh struktural pemerintahan.

Kajian deliberasi dan partisipasi komunikasi dan informasi kebencanaan menjadi satu kajian yang cukup strategis, terlebih teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mendukung kebutuhan akan akses informasi bencana. Fenomena gempa Turki dan Suriah belum lama ini menjadi bukti bahwa kecepatan dan kebebasan informasi di ranah media sosial memberikan tingkat solidaritas tinggi akan respons bencana. Hal ini yang tidak kita jumpai pada tiga dekade yang lalu.

Daftar Pustaka

- Afrizal, Sasongko, A., Tanesia, A., Rokhmani, B., Andang, B., Prakoso, I., Yuliawan, R., Amri, M., & Effendi, V. (2007). *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri Melalui Informasi* (A. Nasir, A. Tanesia, I. Prakoso, & M. Amri (Eds.)). Combine Resource Institution.
- Andronico, D., & Lodato, L. (2005). *Effusive Activity at Mount Etna Volcano (Italy) During the 20th Century : A Contribution to Volcanic Hazard Assessment*. 36, 407–443. <https://doi.org/10.1007/s11069-005-1938-2>.
- Atmojo, M. E. (2020). Pendidikan Dini Mitigasi Bencana. *Jurnal Abdimas BSI*, 3(2), 118–126.
- BPPTKG. (2020). No Title.
- Budiani, S. R., & Nugraha, I. (2014). Kesiapsiagaan Masyarakat Pascabanjir Lahar. In S. R. Ginarsih, U. Listyaningsih, & S. R. Budiani (Eds.), *Aspek Sosial Banjir Lahar* (pp. 107–140). Gadjah Mada University Press.
- Cassidy, M., Manga, M., Cashman, K., & Bachmann, O. (2018). Controls on explosive–effusive volcanic eruption styles. *Nature Communications*, 9(2839), 1–16. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05293-3>.

- Coppola, D. P., & Maloney, E. K. (2009). *Communicating Emergency Preparedness*. CRC Press.
- Covello, V. T. (2017). *Risk Communication: An Emerging Area of Health Communication Research*. 8985(December). <https://doi.org/10.1080/23808985.1992.11678816>.
- Dove, M. R. (2008). Perception of volcanic eruption as agent of change on Merapi volcano, Central Java. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 172(3-4), 329-337. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.12.037>.
- Dzulfarook, A. N. (2021, May 8). *Waspada, Indonesia Punya 295 Sesar Aktif*. Kompas.Com.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2009). *Disaster Communication in a Changing Media World*. Elsevier.
- Hidayat, D., & Anisti, A. (2015). Wartawan Media Now dalam Mengemas Berita: Perspektif Situational Theory. *Jurnal ASPIKOM*, 2(5), 295. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i5.81>.
- Husein, R. (2020). Muhammadiyah dan Kemandirian Komunitas dalam Usaha Pengurangan Risiko Bencana. In A. N. Kholis, B. Santoso, D. Haris, & Z. M. Muktaf (Eds.), *Teknologi dan Komunitas: Menguatkan Sumber Daya Pengurangan Risiko Bencana untuk Memajukan Indonesia*. MDMC dan Buku Litera.
- Jayasekara, P. K. (2019). Role of Facebook as a disaster communication media. 8(2), 191-204. <https://doi.org/10.1108/IJES-04-2018-0024>.
- Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (2017). *Jurnalisme Sensitif Bencana: Panduan Peliputan Bencana*. Buku Litera.
- Kaneshima, S., Kawakatsu, H., Matsubayashi, H., Sudo, Y., Tsutsui, T., Ohminato, T., Ito, H., Uhira, K., Yamasato, H., Oikawa, J., Takeo, M., & Iidaka, T. (1996). Mechanism of Phreatic Eruptions at Aso Volcano Inferred from Near-Field Broadband Seismic

- Observations. *Science*, 273, 642–645. <https://doi.org/10.1126/science.273.5275.643>.
- Magma Indonesia. (2021). *Tipe Gunung Api di Indonesia (A, B, dan C)*. Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi. <https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/tipe-gunung-api-di-indonesia-a-b-dan-c>.
- Novena, M. (2021). *Populasi Manusia ini Selamat dari Letusan Super Gunung Toba, Kok Bisa?* Kompas. <https://sains.kompas.com/read/2020/02/27/190300323/populasi-manusia-ini-selamat-dari-letusan-super-gunung-toba-kok-bisa-?page=al>.
- Nurjanah, Sugiharto R, Kuswanda D, BP Siswanto, A. (2013). *Manajemen Bencana*. Alfabeta.
- Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030. (2015). *Australian Journal of Emergency Management*, 30(3), 9–10.
- Shaw, R., & Gupta, M. (2009). Information, Education, and Communication for Urban Risk Reduction. In R. Shaw, M. Gupta, & A. Sharma (Eds.), *Urban Risk Reduction an Asian Perspective*. Emerald.
- Sulistiyorini, W. (2001). *Anugerah Gunung Merapi*. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan and Penerbit Mediatama.
- Taylor, P., Reynolds, B., & Seeger, M. W. (2005). Journal of Health Communication: International Perspectives Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. *Journal of Health Communication*, 10(March 2013), 37–41. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>.
- United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction. (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*. In *United Nations* (Issue January). http://www.undp.org/bcpr/whats_new/rdr_english.pdf.

Zaki. (2015). "Mahapralaya": Antara Perang dan Gempa disertai Tsunami. Jogjauncover. <https://jogjauncover.blogspot.com/2016/01/mahapralaya-perang-dan-gempa-tsunami.html>.

ProofRead
SB